

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adjie, Habib, 2017, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Ctk. Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Rineka Cipta, Jakarta.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, 2011, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah, (The Turning Point of Local Autonomy)*, UB Press, Malang.
- Harsono, Boedi 2000, *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Husen, Harun M. 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Koentjoro, Diana Hakim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Makmur, 2011, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Murad, Rusmadi 2007, *Menyikapi Tabir Masalah Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan, 2009, *Hukum Admnistrasi Di Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Santoso, Urip 2015, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan ke-5, PT Adhitya Andrebina Agung, Jakarta.
- Shant, Dellyana 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Sidik, Salim H. 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Edisi 1 Cetakan ke-2, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.

-----1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, UI Press, Jakarta.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3746

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5893

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah; Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2171

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3696

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian ATR/BPN; Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 395

C. Jurnal dan Penelitian

Aditama, Purna Noor 2018, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak pada Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli”, *Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 1.

Ilahude, Caesar Ilham 2017, “Pengawasan dan Pembinaan Kantor Pertanahan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Susanto, Djoko 2014, “Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Pengawasan Dan Pembinaan BPN Terhadap PPAT”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No 1.

Triyono, 2019, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan Implikasi Hukumnya bagi Masyarakat Umum”, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 17, No. 2.

Zulkarnain, Ockhy Loedvian 2019, “Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) oleh Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

E. Website

<https://www.atrbpn.go.id/?menu=sekilas>

<https://www.kbbi.web.id/renvoi>